

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.”

Lebih lanjut definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Yoyo Sudiaryo, dkk (2017:33) adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas.”

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:134) adalah:

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah mengacu pada regulasi, system dan sarana pendukung, serta sumber daya manusia. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian SAP merupakan syarat penting yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan sangat dibutuhkan dalam rangka pembuatan atau penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.1.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian (2010:137) SAP memiliki indikator adalah sebagai berikut:

1. Regulasi,
2. Sumber daya manusia,

3. Sistem dan Sarana Pendukung.

Adapun indikator SAP yang disampaikan oleh Anggota IKAPI (2011:262) sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi
2. Nilai Historis
3. Realisasi
4. Substansi mengungguli Bentuk Formal
5. Periodisitas
6. Konsistensi
7. Pengungkapan Kelengkapan
8. Penyajian wajar.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini menggunakan indikator untuk Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Regulasi harus sesuai dengan kebijakan, Sistem dan Sarana Pendukung harus memadai dan Sumber Daya Manusia yang paham dan mampu menjalankan standar akuntansi tersebut.

2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Krismiaji (2015:120) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat memproses data dan transaksi yang berguna untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan suatu bisnis untuk dapat menghasilkan informasi yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan.”

Menurut Kusriani dan Andi Koniyo (2007:10) :

“Sistem informasi akuntansi keuangan adalah sistem informasi akuntansi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang

berguna bagi pemakainya dengan ketepatan waktu, fleksibilitas dan daya audit.”

2.1.2.2 Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Sari (2014) indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah :

1. Tingkat ketepatan Waktu
2. Tingkat Fleksibilitas
3. Tingkat efisiensi biaya
4. Tingkat Daya Audit

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penelitian ini menggunakan indikator untuk untuk Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Tingkat Kecepatan, Tingkat Keamanan, Tingkat Efisiensi Biaya dan Tingkat Kualitas Hasil.

2.1.2.3 Siklus Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Warsito Kawedar (2011:68) menyatakan bahwa siklus sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi akuntansi daerah memiliki beberapa sistem bagian yang berupa siklus akuntansi. Siklus akuntansi daerah menunjukkan suatu prosedur akuntansi daerah, mulai dari sumber data sampai ke proses pencatatan/pengolahan akuntansinya.”

Berikut ini adalah pembagiaan dari siklus akuntansi daerah yang berbentuk modul menurut (Warsito Kawedar, 2008:69) adalah Modul Penyusunan Anggaran, Modul Penatausahaan Keuangan, Modul Akuntansi dan Pelaporan, serta Modul Penyusunan Anggaran.

Modul Penyusunan Anggaran adalah modul yang digunakan untuk membantu proses penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Modul Penyusunan Anggaran diinstall dan digunakan oleh SKPD dengan sistem *Batch*. Berbeda dengan sistem *Online*, sistem *Batch* tidak memerlukan Jaringan Komputer (*Local Area Network*). Hal ini untuk mengatasi kendala terbatasnya jaringan telekomunikasi yang tidak tersedia ke SKPD-SKPD yang berjauhan letaknya seperti kecamatan-kecamatan. SKPD dapat bekerja menginput data-data Anggaran (RKA) di lokasi mereka masing-masing. Setelah selesai diinput, data-data RKA dari seluruh SKPD akan digabungkan (konsolidasi) sehingga menjadi data anggaran pemerintah daerah. Tabel

Pendukung Dari Modul Penyusunan Anggaran: Tabel Kode Urusan dan Kode SKPD, Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Kode Program dan Kegiatan, dan Tabel Standar Harga Barang dan Jasa (bila ada).

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Indra Bastian (2010:145) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan adalah suatu gambaran untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diwajibkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”

Selanjutnya menurut Masmudi (2003:77) menyatakan definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”.

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:146):

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.”

Adapun menurut Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2011:44):

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.”

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Sedangkan Halim menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Indra Bastian, (2010:48) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna
- 2) kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji)
- 3) kualitas sekunder; konsisten, komparatif
- 4) kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) yang terkait kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. dapat dipahami.

Sedangkan menurut Mahmudi (2011:2) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan pelaporan laporan keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, isi laporan keuangan dapat diverifikasi, keakuratan informasi yang disajikan, isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini menggunakan indikator untuk Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, jelas dan akurat, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Karena kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik jika laporan keuangan yang disajikan dapat di andalkan dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan standar yang berlaku, mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93) menyatakan bahwa kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

“kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting.”

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain itu menurut pendapat Deddi Nordiawan (2010:25) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu SAP diterapkan di lingkup

pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

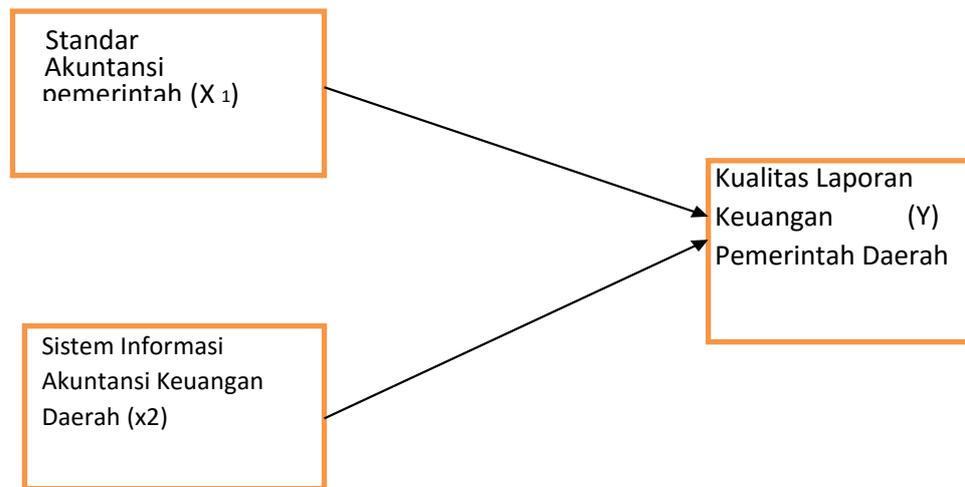
2.2.2 Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tahun 2003 telah lahir UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintah sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah yang merupakan tonggak sejarah lahirnya PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini penting mengingat tanpa standar tersebut, pemerintah tidak memiliki dasar acuan standar pemeriksaan keuangan dan kemudian, lahir Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Kepmendagri No 29 tahun 2002. Pedoman tersebut menjelaskan secara rinci tugas, wewenang dan prosedur-prosedur tatalaksana keuangan daerah yang lengkap dengan lampiran dan dokumen-dokumen operasional mengenai pengelolaan keuangan daerah. Satu tahun berikutnya, peraturan ini direvisi dengan terbitnya

Permendagri No 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 tahun 2006 (Indra Bastian, 2010).

Maka dari itu, Petugas Pengelolaan Daerah harus merancang sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. Sehingga lembaga publik, Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara benar melalui pengesahan yang bertugas melakukan *auditing* / pemeriksaan keuangan daerah, lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) badan Negara yang independen, BPK melakukan audit secara komprehensif dan memberikan opini mengenai tingkat kewajaran laporan tersebut (Indra Bastian, 2010).

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2014:99) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah asumsi atau dugaan dengan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik.

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Adanya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H₂ : Adanya pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.